



SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
No. 108/C.02.01/LPPM/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : LPPM-Itenas
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Indrianawati, S.T., M.T.	20121205	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Pemetaan Jaringan Wilayah Penyelenggara Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tempat : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Waktu : 14 Oktober – 14 Desember 2020
Sumber Dana : PT Effort Digital Mulitsolution

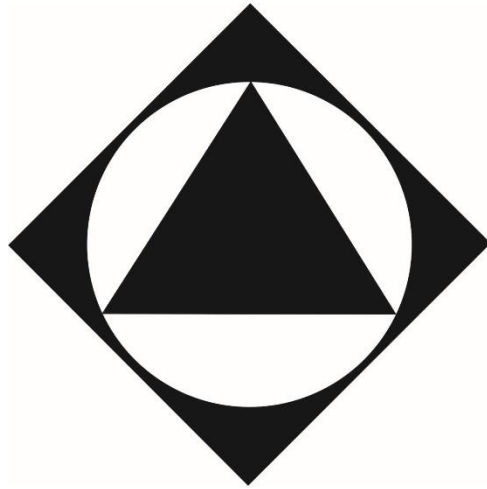
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 11 Februari 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Itenas
Kepala,

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NPP. 20010601

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**JUDUL:
PEMETAAN JARINGAN WILAYAH
PENYELENGGARA POS**

**KETUA TIM:
INDRIANAWATI, M.T.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pemetaan Jaringan Wilayah Penyelenggara Pos
Nama Mitra : Kementerian Komunikasi dan Informatika

Ketua Tim Pengusul

NIDN/NIDK : 0410098605
Nama lengkap (beserta gelar) : Indrianawati, M.T.
Pangkat/Golongan : III-B
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi/Fakultas : Teknik Geodesi/Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Bidang Keahlian : GIS, Geodatabase, Spatial Analysis
Alamat Kantor : Jl. PKH. Hasan Mustopa No. 23 Bandung 40124
Telepon/Faks Kantor : +62-22-7272215 / +62 -227202892
Alamat Rumah : Jatihandap
Nomor HP/WA : 0821-3000-0151
Email : indrianawati@itenas.ac.id
ID Sinta : 6009895

Lokasi Kegiatan

Nama Mitra : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Wilayah Mitra : Jl. Merdeka Barat No.9 RW.3, Gambir
• Desa/Kecamatan : Gambir
• Kota/Kabupaten : Jakarta Pusat
• Provinsi : DKI Jakarta
• Jarak PT ke Mitra : 154 km
Luaran yang dihasilkan : Database Titik Layanan Pos di Indonesia
Waktu Pelaksanaan : 14 Oktober s.d. 14 Desember 2020
Total Biaya : Rp 5.000.000,00
Sumber pendanaan : PT EFORT Digital Multisolutions

Bandung, 11 Februari 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Ketua Tim Pengusul



Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.
NIDN : 0412017610

Indrianawati, M.T.
NIDN : 0410098605

Disahkan oleh :
Ketua LP2M Itenas

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NIDN : 0403017701

KEGIATAN PEMETAAN JARINGAN WILAYAH PENYELENGGARA POS

1. Latar Belakang

Dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional, sektor pos dan logistik memiliki peranan penting mendukung kelancaran perekonomian bangsa sebagai salah satu rangkaian distribusi surat atau paket sampai kepada alamat tujuan konsumen. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 38 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan tersebut salah satu diantaranya melalui penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang memungkinkan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk mengirim dan menerima surat atau paket sebagai media komunikasi hingga sarana penunjang perekonomian.

Saat ini, pemetaan penyelenggara pos belum tersedia secara detail khususnya pemetaan Layanan Pos Universal. Dimana pada setiap kantor cabang di kota kecil yang kondisi-nya tidak layak secara usaha dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah dengan ketentuan kantor pos cabang berada di luar Ibu Kota Kabupaten. Diperlukan sebuah perangkat aplikasi yang dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah dalam melakukan pemetaan jaringan penyelenggara pos, apalagi pada saat ini sudah banyak penyelenggara pos melaksanakan pembangunan, pengembangan wilayah pada daerah perkotaan dan daerah terpencil. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan pemetaan penyelenggara pos yang lebih terperinci dan menjadi acuan regulator dalam pemetaan kantor pos.

Dengan adanya Kegiatan Pemetaan Jaringan Wilayah Penyelenggara Pos ini diharapkan dapat diketahui posisi kantor pos subsidi dan non subsidi berdasarkan pengelompokan ataupun gambaran titik keramaian suatu kantor pos cabang, kegiatan penyelenggara pos lainnya serta dapat diketahui juga mengenai gambaran geografis suatu daerah atau area yang dapat terdeskripsi dengan jelas dimana suatu posisi kantor pos cabang subsidi berada. Pengembangan wilayah pembangunan kantor pos cabang baru sebagai akibat pemekaran wilayah sudah banyak dilakukan, oleh sebab itu perlu dilakukan pemetaan yang lebih terperinci mengenai posisi atau lokasi suatu wilayah baik letak yang didasarkan atas koordinat garis lintang dan bujur sebagaimana contoh lokasi kantor pos cabang Soreang, Bandung terletak antara 6°54' LS dan 107°36' BT, dan juga dapat memperhatikan ukuran (ukuran luas daerah dan jarak), memperlihatkan kecenderungan bentuk (benua, pulau, negara, gunung, arah pengembangan wilayah), menunjukkan ketinggian tempat atau sudut evaluasi berbagai wilayah dan objek geografis lainnya, mengumpulkan dan menyeleksi data atau informasi dari suatu daerah dan menyajikannya secara grafis dan nongrafis di atas peta sehingga dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam memutuskan perencanaan pemerataan pembangunan suatu wilayah sebagaimana sesuai Program Presiden terpilih dengan berpedoman Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 dan menjadi acuan pemetaan kantor pos cabang yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan pemetaan jaringan wilayah penyelenggara pos ini adalah melakukan pemetaan titik layanan pos di wilayah NKRI berbasis digital. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data titik layanan pos berbasis digital di wilayah NKRI untuk mendukung pemerataan akses layanan pos sehingga aksesibilitas masyarakat dalam menerima dan mengirim layanan Pos dapat terlayani.

3. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan Pemetaan Jaringan Wilayah Penyelenggara Pos ini lingkup wilayahnya adalah kantor pos cabang bersubsidi yang berada di luar Ibu kota Kabupaten sebagaimana pengembangan wilayah layanan pos mulai dari Regional I sampai dengan Regional XI tersebar setiap daerah yang telah dilakukan evaluasi oleh tim dengan merujuk peraturan dan perundangan yang berlaku dan selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel 1 - Lokasi Pekerjaan dan Lingkup Area

No	Kantor Regional	Lingkup Area
1	Regional I Pusat Medan	Prov. Aceh, Prov. Sumatera Utara
2	Regional II Pusat Padang	Prov. Riau, Prov. Kepulauan Riau, Prov. Sumatera Barat
3	Regional III Pusat Palembang	Prov. Bengkulu, Prov. Jambi, Prov. Lampung, Prov. Sumatera Selatan, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
4	Regional IV Pusat Jakarta	Prov. DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang
5	Regional V Pusat Bandung	Prov. Jawa Barat, Prov. Banten
6	Regional VI Pusat Semarang	Prov. Jawa Tengah, Prov. DI Yogyakarta
7	Regional VII Pusat Surabaya	Prov. Jawa Timur
8	Regional VIII Pusat Denpasar	Prov. Bali, Prov. Nusa Tenggara Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur
9	Regional IX Pusat Banjarbaru	Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Utara, Prov. Kalimantan Selatan
10	Regional X Pusat Makassar	Prov. Gorontalo, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Sulawesi Barat, Prov. Sulawesi Tenggara, Prov. Sulawesi Selatan, Prov. Maluku, Prov. Maluku Utara
11	Regional XI Pusat Jayapura	Prov. Papua Barat, Prov. Papua



Gambar 1 – Sebaran Lokasi Kantor Regional Pos

4. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi sebaran titik layanan pos universal dan menyusun konsep wilayah layanan pos universal dengan mempertimbangkan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukur jumlah penduduk, infrastruktur, transportasi berdasarkan titik koordinat.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui survey lapangan serta pemetaan titik layanan terhadap suatu wilayah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan letak geografis yang dipertanggungjawabkan secara at cost yang dilakukan di daerah Regional Pos:
 - Regional 1 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Medan)
 - Regional 2 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Padang)
 - Regional 3 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Palembang)
 - Regional 4 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Jakarta)
 - Regional 5 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Bandung)
 - Regional 6 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Semarang)
 - Regional 7 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Surabaya)
 - Regional 8 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Denpasar)
 - Regional 9 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Banjarbaru)
 - Regional 10 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Makassar)
 - Regional 11 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Jayapura)
- c. Mengumpulkan data dan menganalisa hasil survey dari masing-masing Regional dalam bentuk data base titik layanan pos universal.
- d. Membuat rekomendasi kriteria dan penyediaan titik layanan pos universal di wilayah NKRI khususnya di kawasan prioritas.
- e. Menyusun laporan kegiatan.

5. Keluaran

Dalam kegiatan pemetaan jaringan wilayah penyelenggara pos ini diharapkan menghasilkan keluaran berupa database titik layanan pos di wilayah Indonesia dan laporan kegiatan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Recording

Pendahuluan

- Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional, sektor pos dan logistik memiliki peranan penting mendukung kelancaran perekonomian bangsa sebagai salah satu rangkaian distribusi surat atau paket hingga sampai kepada alamat tujuan konsumen (UU No.38/2009)
- Peta penyelenggara pos belum tersedia secara detail, khususnya pemetaan layanan pos universal, dimana pada setiap kantor cabang di kota kecil yang kondisi-nya tidak layak secara usaha dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah dengan ketentuan kantor pos cabang berada di luar Ibu Kota Kabupaten.
- Diperlukan sebuah perangkat aplikasi yang dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah untuk melakukan pemetaan jaringan penyelenggara pos.
- Perlu dilakukan kegiatan pemetaan penyelenggara pos yg lebih terperinci dan menjadi acuan regulator dalam pemetaan kantor.

Fiona

Indrianawati

Hari Hermawan

PT. EPORT - Sum...

Bagus Kurnia

Azimi H

Rizka P

Alya Arum

Hadi Purnomo

iPhone Rusmaw...

Connecting...

Recording

Rekomendasi

- Selain melaksanakan survei langsung ke Kantor Regional, untuk melengkapi data juga disediakan form isian secara online yang dapat diakses dan diisi oleh kantor regional atau kantor cabang secara langsung. (<https://form.jotform.com/203152389133045>) - form ini bisa digunakan untuk updating secara kontinyu.
- Form isian untuk melengkapi survei ini dapat diisi secara online dengan fitur unggah foto dengan geotaging, sehingga koordinat lokasi dapat langsung diketahui.
- Pemetaan digital dibangun menggunakan geodatabase standar dan menggunakan peta dasar nasional, geodatabase ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan seluruh data pendukung Pos dengan tema-tema lain, sekaligus dapat dikembangkan untuk analisis spasial lainnya.
- Direktorat Pos, Kementerian Kominfo perlu melakukan survey dan pengumpulan data terhadap Perusahaan Jasa Titipan lainnya dan/atau penyelenggara Layanan Pos Komersial guna menambah perbendaharaan database.

Fiona

Indrianawati

Hari Hermawan

PT. EPORT - Sum...

Bagus Kurnia

Azimi H

Rizka P

Alya Arum

Hadi Purnomo

iPhone Rusmaw...

Bagus Kurnia

Recording

REGIONAL X MAKASSAR

No	Urutan	Jumlah	PSD/Sebid
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemeriksa (KPRK)	16	-
3.	Sentral Pengolahan Pos (SPP)	-	-
4.	Kantor Pos Cabang Dalam Kota (KPC-DK)	41	-
5.	Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPC-LK)	317	242
6.	Loket Ekstensi (LE)	28	-
Total		403	-

Tingkat Kepadatan Sosial-Ekonomi	Jumlah Kantor Pos Cabang	Hasil Evaluasi
Rendah	277	Dipertahankan
Sedang	57	Dipertimbangkan
Tinggi	24	Dikembangkan
Jumlah	358	

Fiona

Indrianawati

Hari Hermawan

PT. EPORT - Sum...

Bagus Kurnia

Azimi H

Rizka P

Alya Arum

Hadi Purnomo

iPhone Rusmaw...



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
Jl. Medan Merdeka Barat no. 5, Jakarta 10110

PEMETAAN JARINGAN WILAYAH PENYELENGGARA POS



Pendahuluan

- Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional, sektor pos dan logistik memiliki peranan penting mendukung kelancaran perekonomian bangsa sebagai salah satu rangkaian distribusi surat atau paket hingga sampai kepada alamat tujuan konsumen (UU No.38/2009)
- Peta penyelenggara pos belum tersedia secara detail, khususnya **pemetaan layanan pos universal**, dimana pada setiap kantor cabang di kota kecil yang kondisi-nya tidak layak secara usaha dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah dengan ketentuan kantor pos cabang berada di luar Ibu Kota Kabupaten.
- Diperlukan sebuah **perangkat aplikasi yang dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah untuk melakukan pemetaan jaringan penyelenggara pos**.
- Perlu dilakukan **kegiatan pemetaan penyelenggara pos** yg lebih terperinci dan menjadi acuan regulator dalam pemetaan kantor.

Maksud, Tujuan & Lingkup Kegiatan

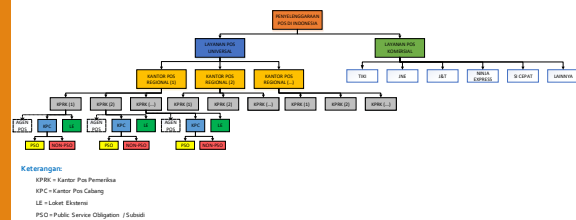
Maksud : Melakukan pemetaan titik layanan pos di wilayah NKRI berbasis digital

Tujuan : Tersedianya data titik layanan pos berbasis digital di wilayah NKRI untuk mendukung pemerataan akses layanan pos sehingga aksesibilitas masyarakat dalam menerima dan mengirim layanan Pos dapat terlayani

Lingkup Kegiatan :

- Mengidentifikasi sebaran titik layanan pos universal dan menyusun konsep wilayah layanan pos universal dengan mempertimbangkan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tolak ukur jumlah penduduk, infrastruktur, transportasi berdasarkan titik koordinat.
- Melakukan monitoring dan evaluasi melalui survey lapangan serta pemetaan titik layanan terhadap suatu wilayah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan letak geografis yang dilakukan di daerah Regional Pos.
- Mengumpulkan data dan menganalisa hasil survey dari masing-masing Regional dalam bentuk data base titik layanan pos universal.
- Membuat rekomendasi kriteria dan penyediaan titik layanan pos universal di wilayah NKRI.
- Menyusun Laporan kegiatan.

Hirarki Penyelenggaraan Pos :



Gambar Lapangan: Struktur dan Kantor Pos Regional untuk memperoleh data informasi Kantor Pos Regional, KPRK, KPC (PSO & Non-PSO) dan LE

Lokasi Survei:

No	Kantor Regional	Lingkup Area
1	Regional I Pusat Medan	1) Pos. Bangkaya Aceh Darussalam 2) Pos. Banda Aceh
2	Regional II Pusat Padang	1) Pos. Bukittinggi 2) Pos. Kepulauan Riau 3) Pos. Sumatera Barat
3	Regional III Pusat Palembang	1) Pos. Bengkulu 2) Pos. Jambi 3) Pos. Lampung 4) Pos. Sumatera Selatan 5) Pos. Kepulauan Bangka Belitung
4	Regional IV Pusat Jakarta	1) Pos. DKI Jakarta 2) Bekasi 3) Tangerang
5	Regional V Pusat Bandung	1) Pos. Jawa Barat 2) Pos. Garut
6	Regional VI Pusat Semarang	1) Pos. Jawa Tengah 2) Pos. Yogyakarta
7	Regional VII Pusat Denpasar	1) Pos. Jawa Timur 2) Pos. Bali 3) Pos. Nusa Tenggara Barat 4) Pos. Nusa Tenggara Timur
8	Regional VIII Pusat Surabaya	1) Pos. Kalimantan Barat 2) Pos. Kalimantan Timur 3) Pos. Kalimantan Tengah 4) Pos. Kalimantan Utara 5) Pos. Kalimantan Selatan
9	Regional IX Pusat Banjarmasin	1) Pos. Gorontalo 2) Pos. Sulawesi Utara 3) Pos. Sulawesi Tengah 4) Pos. Sulawesi Barat 5) Pos. Sulawesi Tenggara 6) Pos. Sulawesi Selatan 7) Pos. Maluku 8) Pos. Maluku Utara
10	Regional X Pusat Makassar	1) Pos. Sulawesi Selatan 2) Pos. Sulawesi Tenggara 3) Pos. Sulawesi Barat 4) Pos. Sulawesi Selatan 5) Pos. Maluku 6) Pos. Maluku Utara
11	Regional XI Pusat Jayapura	1) Pos. Papua Barat 2) Pos. Papua

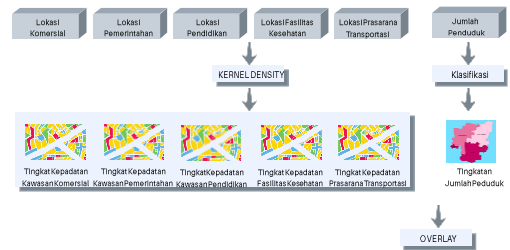
DATA HASIL SURVEY LAPANGAN :

- Nama Kantor Pos
- Jenis Kantor Pos (Kantor Regional, KPRK, KPC (PSO & Non-PSO) dan LE)
- Tipe Kantor Pos
- Kode Kantor Pos
- Singkatan Kantor Pos
- Alamat Kantor Pos (Alamat, Desa/Kel, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi)
- Lokasi Koordinat Kantor Pos
- Nomor Telepon
- Nomor Fax
- Status Kepemilikan Bangunan
- Jam Layanan
- Jenis Pelayanan
- Jumlah SDM
- Jumlah Produksi/Pelanggan
- Kerjasama yang dilakukan
- Permasalahan yang dihadapi terkait Penyelenggaraan Pos
- Informasi Lainnya (website, email, facebook, twitter, dll)

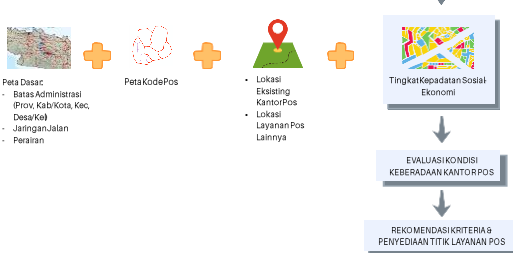
DATA SEKUNDER YANG DIGUNAKAN:

No	Data Sekunder	Sumber	Tahun
1.	Peta Batas Administrasi (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	BIG	2020
2.	Peta Perairan (Sungai, Danau, dll)		
3.	Peta Jaringan Jalan		
4.	Data Kode Pos Nasional	Kemendagri	2020
5.	Data Jumlah Penduduk per Kecamatan	BPS	2019
6.	Sebaran Prasarana Transportasi (Lokasi Stasiun, Terminal, Bandara, Pelabuhan)		
7.	Sebaran Lokasi Komersial	Instansi/Lembaga Lainnya	2018-2020
8.	Sebaran Lokasi Pemerintahan		
9.	Sebaran Lokasi Pendidikan		
10.	Sebaran Lokasi Fasilitas Kesehatan		
11.	Sebaran Lokasi Layanan Pos Lainnya		

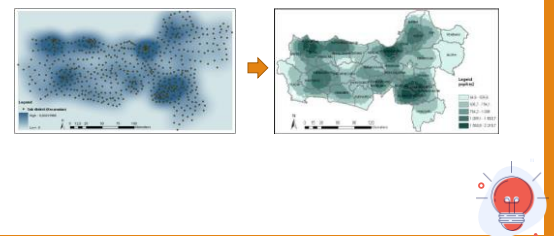
Metodologi Pemetaan:



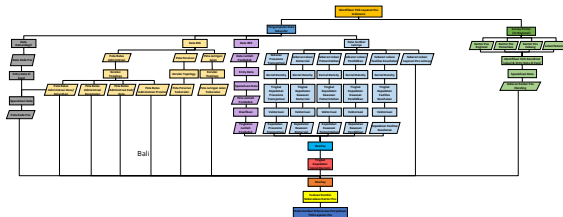
Metodologi Pemetaan



Kernel Density



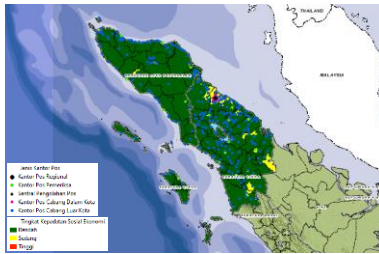
Teknis Pelaksanaan



Produk Akhir yang disampaikan :



HASIL KEGIATAN : REGIONAL I MEDAN



No	Struktur	Jumlah	PBB/Sebulan
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemukiman (KPPM)	19	-
3.	Sentral Pengalihan Pos (SPP)	1	-
4.	Kantor Pos Cabang	31	-
5.	Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPC-LK)	272	221
6.	Kantor Ekstensi (LE)	-	-
Total		324	-

Tingkat Ketersediaan Sosial Ekonomi	Jumlah Kantor Pos Cabang	Status Evaluasi
Berdah	226	Diperhatikan
Sedang	56	Diperhatikan
Tinggi	21	Diperhatikan
Jumlah		303

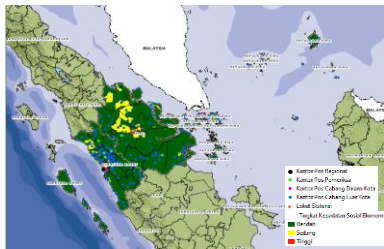


Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional I Medan

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Nanggroe Aceh Darussalam	104	7 KPRK, 6 KPC-DK, 91 KPC-LK
2	Sumatera Utara	220	1 Kantor Regional, 1 SPP, 12 KPRK, 25 KPC-DK, 181 KPC-LK

No	Provinsi	Jumlah		Kantor Pos Eksisting		Tidak Ada Kantor Pos	
		Kab/Kota	Rec	Kab/Kota	Rec	Kab/Kota	Rec
1	Nanggroe Aceh Darussalam	23	209	23	103	23	186
2	Sumatera Utara	33	427	33	205	31	222

REGIONAL II PADANG



No	Struktur	Jumlah	PBB/Sebulan
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemukiman (KPPM)	16	-
3.	Sentral Pengalihan Pos (SPP)	-	-
4.	Kantor Pos Cabang	54	-
5.	Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPC-LK)	179	122
6.	Kantor Ekstensi (LE)	10	-
Total		260	-

Tingkat Ketersediaan Sosial Ekonomi	Jumlah Kantor Pos Cabang	Status Evaluasi
Berdah	138	Diperhatikan
Sedang	72	Diperhatikan
Tinggi	21	Diperhatikan
Jumlah		233

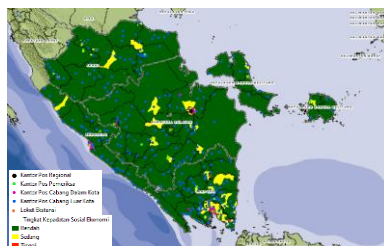


Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional II Padang

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Riau	86	5 KPRK, 12 KPC-DK, 59 KPC-LK, 10 LE
2	Kepulauan Riau	48	2 KPRK, 16 KPC-DK, 25 KPC-LK, 5 LE
3	Sumatera Barat	134	1 Kantor Regional, 9 KPRK, 26 KPC-DK, 95 KPC-LK, 3 LE

No	Provinsi	Jumlah		Kantor Pos Eksisting		Tidak Ada Kantor Pos	
		Kab/Kota	Rec	Kab/Kota	Rec	Kab/Kota	Rec
1	Riau	12	163	12	76	12	87
2	Kepulauan Riau	7	64	7	38	7	26
3	Sumatera Barat	19	176	19	109	17	67

REGIONAL III PALEMBANG



No	Struktur	Jumlah	PBB/Sebulan
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemukiman (KPPM)	17	-
3.	Sentral Pengalihan Pos (SPP)	-	-
4.	Kantor Pos Cabang	66	-
5.	Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPC-LK)	279	218
6.	Kantor Ekstensi (LE)	11	-
Total		364	-

Tingkat Ketersediaan Sosial Ekonomi	Jumlah Kantor Pos Cabang	Status Evaluasi
Berdah	249	Diperhatikan
Sedang	64	Diperhatikan
Tinggi	21	Diperhatikan
Jumlah		325

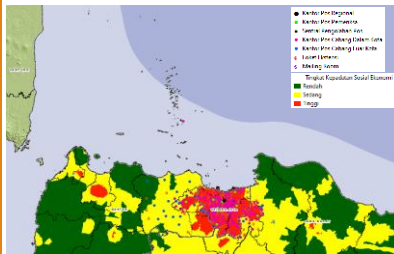


Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional III Palembang

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Bengkulu	50	2 KPRK, 9 KPC-DK, 39 KPC-LK
2	Jambi	65	3 KPRK, 62 KPC-LK
3	Lampung	106	3 KPRK, 15 KPC-DK, 87 KPC-LK, 1 LE
4	Sumatera Selatan	109	1 Kantor Regional, 7 KPRK, 22 KPC-DK, 76 KPC-LK, 3 LE
5	Kepulauan Bangka Belitung	17	2 KPRK, 15 KPC-LK

No	Provinsi	Jumlah		Kantor Pos Eksisting		Tidak Ada Kantor Pos	
		Kab/Kota	Rec	Kab/Kota	Rec	Kab/Kota	Rec
1	Bengkulu	10	127	10	47	10	80
2	Jambi	11	138	11	57	11	81
3	Lampung	15	225	15	97	15	128
4	Sumatera Selatan	17	230	17	90	17	140
5	Kepulauan Bangka Belitung	7	47	7	17	7	30

REGIONAL IV JAKARTA



No	Struktur	Jumlah	Pada Tahun
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemukiman (KPP)	7	-
3.	General Pengalihan Pos (GPP)	1	-
4.	Kantor Pos Cabang	214	-
5.	Kantor Pos Cabang Latah (KPC-LK)	23	3
6.	Kantor Pos Cabang Latah (KPC-LK)	77	-
7.	Mailing Room	1	-
Total		326	-

Tingkat Kepadatan Sosial Ekonomi	Jumlah Kantor Pos Cabang	Status Evaluasi
Rendah	2	Diperhatikan
Sedang	30	Diperhatikan
Tinggi	205	Diperhatikan
Jumlah		237

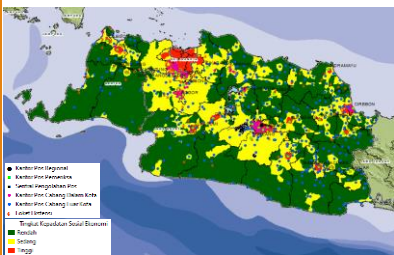


Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional IV Jakarta

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	DKI Jakarta	243	1 Kantor Regional, 1 SPP, 5 KPRK, 178 KPC-DK, 55 LE, 3 Mailing Room
2	Bekasi	37	1 KPRK, 24 KPC-DK, 3 KPC-LK, 9 LE
3	Tangerang	46	1 KPRK, 12 KPC-DK, 20 KPC-LK, 13 LE

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kec	Kantor Pos Eksisting Kab/Kota	Kantor Pos Eksisting Kec	Tidak Ada Kantor Pos Kab/Kota	Tidak Ada Kantor Pos Kec
1	DKI Jakarta	6	44	6	43	1	1
2	Bekasi	2	15	2	15	-	-
3	Tangerang	2	36	2	28	2	8

REGIONAL V BANDUNG



No	Struktur	Jumlah	Pada Tahun
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemukiman (KPP)	27	-
3.	General Pengalihan Pos (GPP)	1	-
4.	Kantor Pos Cabang	134	-
5.	Kantor Pos Cabang Latah (KPC-LK)	364	271
6.	Kantor Pos Cabang Latah (KPC-LK)	91	-
Total		618	-

Tingkat Kepadatan Sosial Ekonomi	Jumlah Kantor Pos Cabang	Status Evaluasi
Rendah	134	Diperhatikan
Sedang	254	Diperhatikan
Tinggi	105	Diperhatikan
Jumlah		498

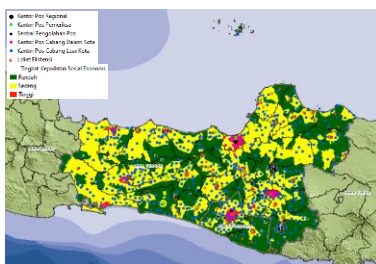


Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional V Bandung

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Jawa Barat	523	1 Kantor Regional, 1 SPP, 22 KPRK, 111 KPC-DK, 327 KPC-LK, 61 LE
2	Banten	95	5 KPRK, 23 KPC-DK, 37 KPC-LK, 30 LE

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kec	Kantor Pos Eksisting Kab/Kota	Kantor Pos Eksisting Kec	Tidak Ada Kantor Pos Kab/Kota	Tidak Ada Kantor Pos Kec
1	Jawa Barat	26	611	26	421	23	190
2	Banten	7	119	6	67	6	52

REGIONAL VI SEMARANG



No	Struktur	Jumlah	Pada Tahun
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemukiman (KPP)	39	-
3.	General Pengalihan Pos (GPP)	2	-
4.	Kantor Pos Cabang	98	-
5.	Kantor Pos Cabang Latah (KPC-LK)	503	424
6.	Kantor Pos Cabang Latah (KPC-LK)	75	1
Total		713	-

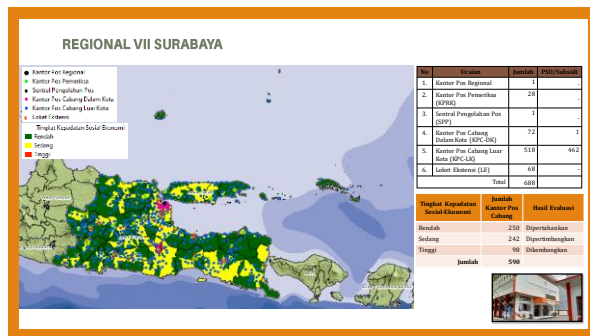
Tingkat Kepadatan Sosial Ekonomi	Jumlah Kantor Pos Cabang	Status Evaluasi
Rendah	117	Diperhatikan
Sedang	377	Diperhatikan
Tinggi	107	Diperhatikan
Jumlah		601



Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional VI Semarang

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Jawa Tengah	617	1 Kantor Regional, 1 SPP, 29 KPRK, 76 KPC-DK, 446 KPC-LK, 64 LE
2	DI Yogyakarta	96	1 SPP, 4 KPRK, 22 KPC-DK, 57 KPC-LK, 12 LE

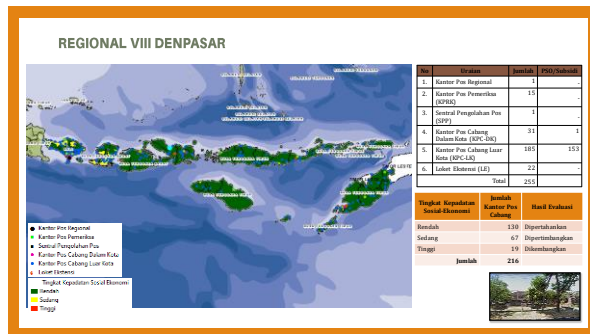
No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kec	Kantor Pos Eksisting Kab/Kota	Kantor Pos Eksisting Kec	Tidak Ada Kantor Pos Kab/Kota	Tidak Ada Kantor Pos Kec
1	Jawa Tengah	35	573	34	519	16	54
2	DI Yogyakarta	5	78	5	77	1	1



Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional VII Surabaya

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Jawa Timur	688	1 Kantor Regional, 1 SPP, 28 KPRK, 72 KPC-DK, 518 KPC-LK, 68 LE

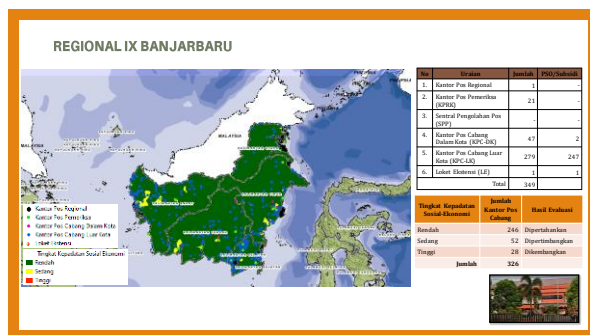
No	Provinsi	Jumlah		Kantor Pos Eksisting		Tidak Ada Kantor Pos	
		Kab/Kota	Kec	Kab/Kota	Kec	Kab/Kota	Kec
1	Jawa Timur	38	664	38	586	28	78



Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional VIII Denpasar

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Bali	79	1 Kantor Regional, 1 SPP, 4 KPRK, 14 KPC-DK, 53 KPC-LK, 6 LE
2	Nusa Tenggara Barat	83	4 KPRK, 10 KPC-DK, 60 KPC-LK, 9 LE
3	Nusa Tenggara Timur	93	7 KPRK, 7 KPC-DK, 72 KPC-LK, 7 LE

No	Provinsi	Jumlah		Kantor Pos Eksisting		Tidak Ada Kantor Pos	
		Kab/Kota	Kec	Kab/Kota	Kec	Kab/Kota	Kec
1	Bali	9	57	9	54	3	3
2	Nusa Tenggara Barat	10	116	10	73	10	43
3	Nusa Tenggara Timur	22	306	22	85	22	221

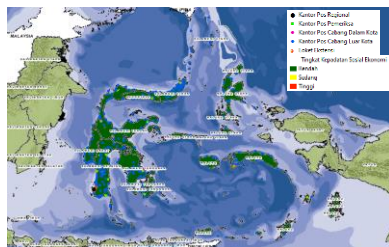


Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional IX Banjarbaru

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Kalimantan Barat	99	5 KPRK, 12 KPC-DK, 81 KPC-LK, 1 LE
2	Kalimantan Timur	79	5 KPRK, 18 KPC-DK, 56 KPC-LK
3	Kalimantan Tengah	62	4 KPRK, 3 KPC-DK, 55 KPC-LK
4	Kalimantan Utara	18	2 KPRK, 2 KPC-DK, 14 KPC-LK
5	Kalimantan Selatan	91	1 Kantor Regional, 5 KPRK, 12 KPC-DK, 73 KPC-LK

No	Provinsi	Jumlah		Kantor Pos Eksisting		Tidak Ada Kantor Pos	
		Kab/Kota	Kec	Kab/Kota	Kec	Kab/Kota	Kec
1	Kalimantan Barat	14	176	14	83	13	93
2	Kalimantan Timur	10	102	9	56	9	46
3	Kalimantan Tengah	14	136	13	54	13	82
4	Kalimantan Utara	5	50	5	18	5	32
5	Kalimantan Selatan	13	152	13	84	11	68

REGIONAL X MAKASSAR



No	Struktur	Jumlah	Persentase
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemukiman (KPP)	16	-
3.	General Pengalihan Pos (GPP)	-	-
4.	Kantor Pos Cabang Dalam Kota (KPC-LK)	41	-
5.	Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPC-LK)	317	242
6.	Kantor Ekstensi (LE)	20	-
Total		403	-

Tingkat Regulasi Sosial Ekonomi	Jumlah Kantor Pos Cabang	Hasil Evaluasi
Rendah	277	Diperbaiki
Sedang	57	Diperbaiki
Tinggi	24	Diperbaiki
Jumlah		358



Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional X Makassar

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Gorontalo	19	1 KPRK, 1 KPC-DK, 14 KPC-LK, 3 LE
2	Sulawesi Utara	65	2 KPRK, 8 KPC-DK, 55 KPC-LK
3	Sulawesi Tengah	58	2 KPRK, 6 KPC-DK, 50 KPC-LK
4	Sulawesi Barat	19	1 KPRK, 18 KPC-LK
5	Sulawesi Tenggara	54	2 KPRK, 6 KPC-DK, 46 KPC-LK
6	Sulawesi Selatan	122	1 Kantor Regional, 5 KPRK, 15 KPC-DK, 83 KPC-LK, 18 LE
7	Maluku	40	2 KPRK, 3 KPC-DK, 28 KPC-LK, 7 LE
8	Maluku Utara	26	1 KPRK, 2 KPC-DK, 23 KPC-LK

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Kec	Kantor Pos Eksisting Kab/Kota	Kec	Tidak Ada Kantor Pos Kab/Kota	Kec
1	Gorontalo	6	77	6	18	6	59
2	Sulawesi Utara	15	167	15	60	15	107
3	Sulawesi Tengah	13	172	13	50	13	122
4	Sulawesi Barat	6	69	6	17	6	52
5	Sulawesi Tenggara	17	213	15	46	17	167
6	Sulawesi Selatan	24	306	24	93	24	213
7	Maluku	11	89	10	28	11	63
8	Maluku Utara	10	112	10	22	10	90

REGIONAL XI JAYAPURA



No	Struktur	Jumlah	Persentase
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemukiman (KPP)	7	-
3.	General Pengalihan Pos (GPP)	1	-
4.	Kantor Pos Cabang Dalam Kota (KPC-LK)	7	-
5.	Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPC-LK)	55	-
6.	Kantor Ekstensi (LE)	-	-
Total		71	-

Tingkat Regulasi Sosial Ekonomi	Jumlah Kantor Pos Cabang	Hasil Evaluasi
Rendah	44	Diperbaiki
Sedang	9	Diperbaiki
Tinggi	9	Diperbaiki
Jumlah		62



Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional XI Jayapura

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Papua Barat	18	2 KPRK, 3 KPC-DK, 13 KPC-LK
2	Papua	53	1 Kantor Regional, 1 SPP, 5 KPRK, 4 KPC-DK, 42 KPC-LK

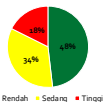
No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Kec	Kantor Pos Eksisting Kab/Kota	Kec	Tidak Ada Kantor Pos Kab/Kota	Kec
1	Papua Barat	13	179	10	18	13	161
2	Papua	29	431	21	45	29	386

PENUTUP

1) Hasil verifikasi lapangan diperoleh informasi :

- jumlah kantor pos total : 4.362
- Kantor Pos Regional (11), SPP (8), KPRK (206), KPC-DK (775), KPC-LK (2.974), LE (385) dan Mailing Room (3).
- Kantor pos subsidi (PSO) (2.315)

2) Sebaran Kantor Pos dan Kondisi Sosial Ekonomi:



Tingkat Regulasi Sosial Ekonomi	Jumlah Kantor Pos Cabang	Hasil Evaluasi
Rendah	1806	Diperbaiki
Sedang	1282	Diperbaiki
Tinggi	661	Diperbaiki

PENUTUP

3) Informasi Pelengkap :

- Tidak semua data kantor pos memiliki informasi koordinat, untuk itu harus ditelusuri dari alamatnya untuk dicari titik koordinatnya dari referensi lain (OSM, Google map, dll).
- Rangkuman hasil diskusi lapangan:
 - Informasi data produksi tidak dapat dijadikan acuan jumlah pengguna karena bisa saja satu pelanggan melakukan lebih dari 1 transaksi. Sehingga untuk mengetahui jumlah pengguna seharusnya diperoleh dari ID konsumen atau pelanggan, tetapi hingga saat ini kantor pos belum memiliki ID untuk Konsumen/Pelanggan.
 - Market Pos lebih banyak di Pulau Jawa, untuk pengiriman surat barang dari Pulau Jawa ke luar Pulau khususnya bagian timur membutuhkan biaya yang besar karena pengiriman kembali dari lokasi bagian timur tersebut sangat jarang lagi jika pengiriman dari Pulau Jawa ke luar Pulau jumlahnya kecil sehingga hal ini yang menjadi salah satu penyebab tarif lebih mahal dan ada PSO subsidi.
 - Tarif Pos relatif lebih mahal jika dibandingkan layanan pos komersial lain karena ada biaya lain-lain.
 - Keterbatasan SDM dan Anggaran banyak karena kantor pos yang sudah tidak layak pakai.
 - Kebutuhan untuk dapat terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat untuk optimasi layanan kepada pelanggan.
 - Tuntutan persaingan dalam bisnis membuat Kantor pos harus bisa bertahan dan lebih maju.

Rekomendasi

- ✓ Selain melaksanakan survei langsung ke Kantor Regional, untuk melengkapi data juga disediakan formisian secara online yang dapat diakses dan diisi oleh kantor regional atau kantor cabang secara langsung. (<https://korpri.kominfo.go.id/0152369123043>) • form ini bisa digunakan untuk update geocodingnya.
- ✓ Form isian untuk kelengkapan survei ini dapat diisi secara online dengan fitur unggah foto dengan geotagging, sehingga koordinat lokasi dapat langsung diketahui.
- ✓ Pemetaan digital dibangun menggunakan *geodatabase standar* dan menggunakan *peta dasar nasional*. geodatabase ini dapat digunakan untuk meregistrasikan seluruh data pendukung Pos dengan tema rema lain, sekaligus dapat dikembangkan untuk analisis spasial lainnya.
- ✓ Direktorat Pos, Kementerian Kominfo perlu melakukan *survey dan pengumpulan data* terhadap Perusahaan Jasa Titipan lainnya dan/atau penyelenggara Layanan Pos Komersial guna menambah perbendaharaan database.



Terimakasih